



LAHAN PERKEBUNAN SAWIT SELUAS 8 Ha. INI DALAM PENGUASAAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
C.D. SATGAS PENERTIBAN KAWASAN HUTAN (PKH)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMER 5 TAHUN 2023
TENTANG PENERTIBAN KAWASAN HUTAN

DILARANG

MEMPERLUAS LELAKAN DAN MENGAKUJI TANPA IZIN SATGAS PENERTIBAN KAWASAN HUTAN





MERDEKA ATAU MATI

Bagi kita warga Indonesia kalimat itu sangat populer. Kalimat terbaik yg diteriakkan oleh para pejuang. Daripada dijajah sudah lebih baik mati.

Kalimat yg bermakna sama juga didapati di tntn :**DARIPADA DIGUSUR LEBIH BAIK DIKUBUR.**

Jangan pikir itu kalimat biasa, itu kalimat tekad bulat, hasil perjuangan bertahun-tahun kemudian dirampas hanya dengan alasan UU. Padahal...masalah di tntn adalah akibat dr RUSAKNYA SISTEM di negara ini. Kades mendapat uang untuk membuat surat, bupati, gubernur dan presiden mendapat keuntungan suara dr para warga, oknum polisi (harus sy sebut oknum krna pada dasarnya polisi itu baik, tugasnya baik bagi rakyat) juga mendapat keuntungan dr pengelolaan lahan yang disebut melanggar hukum, oknum aparat polhut juga sama. Itu sudah menjadi rahasia umum.

Tapi...skrng semua mereka sepakat mengusir rakyat dari tanahnya. Kenapa hanya rakyat yg dikorbankan? Menanggung akibat dari RUSAKNYA SISTEM DI NEGARAINI?

Melihat dirinya dibuat sebagai korban kerusakan sistem itulah...maka rakyat memilih **DIKIRI IR DARIPADA DIGUSUR**

